

# **IMPLEMENTASI PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT* (OVOP) PADA KOPERASI PAGUYUBAN TENUN TROSO KABUPATEN JEPARA**

Oleh :

Rosmalida Novia Adriani

14010110120038

**Departemen Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

## ***Abstract***

*Program One Village One Product (OVOP) is the government's efforts to improve the welfare of the community through productive business activities. One of these activities is done by increasing the value of products in the regions which have market opportunities in domestic and export markets, in addition to the program of One Village One Product (OVOP) according to the Ministry of Cooperatives and UKM RI is "the government's efforts to increase value-added products in the regions in order to improve the welfare of society in a cooperative or UKM."*

*This study aims to determine how the implementation process OVOP program at the cooperative society of Weaving Troso and how it impacts on the OVOP program implementation Troso Weaving cooperative society. In this study, researchers used the method of evaluation research in a qualitative approach, namely to determine the extent of the effectiveness of a program once implemented fully. Evaluation of the implementation of informing the decision maker about what is happening in the program, how the program was developed, and why the program deviate from the original plan. Therefore, qualitative methods suitable to describe the implementation of the program.*

*The results of this study the overall process of implementation of the OVOP program Troso Weaving Cooperative Society has been running well in accordance with the Central Java Governor Instruction number 518/23546. Although the input stage has a bad judgment, it is due to the unavailability of the raw material supply business unit and human resources are inadequate because of education . While the savings and loan business unit that already exist can not fully help undercapitalized member.*

*Keywords: Implementation, OVOP, Troso Weaving*

## A. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan industrialisasi desa pemerintah melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan usaha produktif. Salah satu kegiatan tersebut dilakukan dengan meningkatkan nilai produk-produk unggulan daerah yang memiliki peluang pasar di pasar domestik maupun ekspor. Program tersebut adalah program *One Village One Product* (OVOP) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 6, Tahun 2007 Tanggal 8 Juni. Sasaran utama program OVOP adalah memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang berada dipedesaan maupun daerah. Para pelaku usaha di daerah dan pedesaan mempunyai hak untuk mengajukan produk daerah setempat untuk dijadikan program OVOP (Blue Print OVOP, 2010).

Kementerian Koperasi dan UKM (2010:19) mensyaratkan agar para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkeinginan mendapatkan bantuan program OVOP, harus menjadi anggota koperasi yang menaungi program OVOP di daerah setempat. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan koperasi sebagai wadah bersatunya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta penggerak roda perekonomian rakyat. Persyaratan ini sekaligus dapat membangkitkan kesadaran serta semangat berkoperasi diantara masyarakat setempat.

Tujuh produk unggulan yang disampaikan pada acara "*Launching Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One Product* melalui Koperasi" yang diselenggarakan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Produk Unggulan OVOP Pada Koperasi Jawa Tengah**

No	Produk	Koperasi
1	Tenun Ikat Troso	Koperasi Paguyuban Tenun Troso Jepara
2	Sarung Goyor	Kopinkora Agawe Makmur Sragen
3	Sarung Goyor	KSU Era ATBM Jaya Pemalang
4	Tenun Lurik	KSU Bogor Makmur Klaten
5	Batik	Koperasi Syarikat Dagang Kauman Solo
6	Gula Kelapa	KSU Bogor Makmur Cilacap
7	Kerajinan Kulit Ikan Pari	KSU Sambon Boyolali

*Sumber : Portal PPID Prov. Jateng*

Salah satunya yaitu tenun ikat troso. Tenun ikat troso sangat tepat untuk dijadikan produk unggulan OVOP yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jepara karena telah memenuhi semua kriteria produk OVOP yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM. Tenun Ikat Troso adalah kerajinan tenun ikat yang sangat terkenal di Indonesia. Tenun ikat Troso tersebut berada di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara yang merupakan satu usaha yang diwariskan turun-temurun secara tradisional yang keberadaannya diperkirakan bersamaan dengan masuknya Islamisasi pada masa Kerajaan Mataram. Semula tenun ikat troso dibuat menggunakan tenun pancal pada tahun 1943 dan beralih ke Alat Tenun Bukan Mesi (ATBM) pada tahun 1946, hingga sekarang keterampilan ini terus berkembang hingga usaha tenun ikat troso dijadikan sumber pencaharian utama masyarakat setempat. Para pengusaha tenun Troso juga memproduksi motif etnik dari berbagai daerah, mulai motif tradisional, klasik, sampai diversifikasi produk sutra dan tenun. Varian produk-produk baru berhasil dimunculkan para perajin seiring perkembangan jaman. Ini yang menjadikan tenun Troso tetap eksis, meski kondisi perekonomian terguncang.

Lembaga yang bertanggung jawab atas Program OVOP Tenun Troso adalah KSU Paguyuban Tenun Troso, No badan Hukum: 518/1921/BH/XIV. 10/IV/2008. Anggota KSU Paguyuban Tenun Troso merupakan gabungan para pengusaha tenun

troso berskala kecil dan menengah. Pada Tahun 2013 anggota KSU Paguyuban Tenun Troso adalah 13,1% dari jumlah pengusaha tenun troso di Desa Troso, yaitu sebesar 34 Anggota. Hal itu sangat memprihatinkan mengingat persyaratan para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkeinginan mendapatkan bantuan teknis, permodalan, pemasaran, pelatihan, bimbingan, dan lain-lain dari program OVOP harus menjadi anggota koperasi.

Dalam konteks ini, lembaga koperasi yang akan menjamin kegiatan mekanisme penyampaian keluaran kebijakan berjalan lancar. Penyampaian mekanisme penyampaian keluaran kebijakan yang tidak baik akan berakibat tujuan-tujuan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya tidak akan tercapai

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program OVOP pada Koperasi Paguyuban Tenun Troso dan Bagaimana dampak implementasi program OVOP pada Koperasi Paguyuban Tenun Troso. Teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah definisi implementasi, proses implementasi kebijakan dan factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pelaksanaan atau penerapan”. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009: 131) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan “tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Proses implementasi kebijakan mengindikasikan bahwa proses implementasi bukanlah hal yang mudah. Proses tersebut bukan hanya aktivitas administrasi semata yang hanya dimaknai sebagai fungsi pembagian kerja, pemberian perintah dan mengawasi pelaksanaan suatu pekerjaan atau dalam konseptualisasi sering disebut sebagai masalah perintah dan pengawasan saja. Namun kenyataan yang

sesungguhnya melibatkan berbagai elemen, seperti: kualitas kebijakan, kapasitas organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan, ketepatan instrument untuk mencapai tujuan kebijakan, dan sebagainya.

Tahapan implementasi program dalam proses kebijakan publik menjadi tahap yang sangat penting dan mendapat perhatian lebih dari aktor-aktor kebijakan. Hal ini dikarenakan sering terjadi kesenjangan antara konsep atau rencana yang telah dibuat dengan implementasinya. Sehingga tahapan ini sangat krusial dan perlu konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan dari rencana awal.

### **Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

(1) Komunikasi Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Dengan demikian komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

(2) Sumberdaya dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya yaitu sumber daya manusia, keuangan/anggaran, dan sarana dan prasarana. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara konsisten, tetapi apabila *implementor* kekurangan sumber daya yang untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi Edward dalam Widodo (2009: 104) mengungkapkan bahwa disposisi merupakan “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Implementator yang baik harus memiliki disposisi yang baik, yang dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Perlu ada sikap baik implementor terhadap suatu kebijakan atau mendukungnya maka besar kemungkinan kebijakan akan diimplementasikan sesuai keinginan pembuat keputusan. Begitu pula sebaliknya bila implementor bersikap untuk menolak kebijakan maka implementasi kebijakan akan sulit. Selain itu perlu mendapat perhatian keterbukaan interpretasi implementor terhadap kebijakan yang bisa mengakibatkan pelaksanaan kebijakan menyimpang dari tujuan kebijakan. Akhirnya disposisi berpengaruh terhadap kinerja implementor dan keberhasilan kebijakan.

(4) Struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP). SOP berfungsi menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks dapat menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.

Keempat dimensi tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

### **Permasalahan Dalam Implementasi**

Makinde dalam Purwanto & Sulistyastuti (2012: 85) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses implementasi di negara

berkembang. Berdasarkan data yang diperolehnya, kegagalan implementasi disebabkan oleh:

- 1) Kelompok sasaran (*target beneficiaries*) tidak terlibat dalam implementasi program.
- 2) Program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan social, ekonomi, dan politik.
- 3) Adanya korupsi.
- 4) Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah
- 5) Tidak adanya koordinasi dan monitoring

### **Konsep Dasar *One Village One Product***

Antonius T dalam Muta'ali (2013: 35) mengemukakan bahwa

desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city / town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep perdesaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada satuan wilayah administrasi atau teritorial.

Dalam mewujudkan industrialisasi desa pemerintah melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan usaha produktif. Salah satu kegiatan tersebut dilakukan dengan meningkatkan nilai produk-produk unggulan daerah yang memiliki peluang pasar di pasar domestik maupun ekspor. OVOP merupakan suatu program integratif yang berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan kekayaan daerah, meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan masyarakat, dan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat dan daerahnya. Sumber daya alam ataupun produk budaya lokal serta produk khas lokal yang telah dilakukan secara turun temurun dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang memiliki potensi pasar maupun ekspor.

### **Tujuan dan Sasaran Program OVOP**

Tujuan pelaksanaan Program OVOP dalam Blue Print OVOP (2010: 3) adalah

Suatu upaya membangun *sustainability* (kesinambungan) aktivitas melalui

perluasan akses pasar yang dihasilkan masing-masing desa/daerah. Keberhasilan yang dicapai akan meningkatkan pendapatan para petani/pelaku usaha setempat. Pada akhirnya, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pelaku usaha.

Sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi program OVOP

### **Prinsip Program OVOP**

Prinsip dasar program OVOP adalah dimana masyarakat desa atau daerah dapat menggali komoditas atau produk unggulan secara berkesinambungan, dengan memperoleh dukungan pemerintah dalam melakukan riset atau uji coba. Hal tersebut dilakukan agar kualitas dan kuantitas dapat ditingkatkan. Selain itu pemerintah wajib memberikan metoda-metoda produksi termasuk menyelenggarakan pelatihan, bimbingan dan perluasan pasar.

Sedangkan prinsip-prinsip program OVOP menurut Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK (2010) adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip lokal tapi global.

Kebanyakan orang beranggapan bahwa komoditas lokal tidak mempunyai sifat universal dan komoditas global mempunyai sifat kosmopolitan. Pada kenyataannya bukan demikian, semakin tinggi keaslian dan kekhasan lokal suatu daerah, semakin tinggi nilai dan perhatian secara global terhadap produk tersebut. Namun, komoditas lokal itu sendiri harus dipatenkan dan kualitas mutunya harus ditingkatkan.

#### 2. Kemandirian dan Kreativitas.

Prinsip dengan usaha mandiri dengan inisiatif dan kreativitas berarti secara umum masyarakat pelaku usaha/petani dibebaskan memilih komoditas atau produk yang dapat dikembangkan dalam wadah program OVOP. Masing-masing juga harus sanggup menanggung resiko atas kegiatan usahanya. Pemerintah cukup memberikan dukungan dan kemudahan dalam manajemen *supply chain*. Dalam jangka panjang, prinsip ini akan membentuk budaya yang sangat luar biasa.



### 3. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Melalui program OVOP dapat dilakukan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) sebagai komponen terpenting dalam mengkampanyekan program OVOP. Seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat pelaku usaha/petani harus menghasilkan nuansa khas dan unik di desa atau didaerahnya. Mereka harus terpacu mendorong sumber daya manusia disekitarnya agar mampu berinovasi dan berkreasi, serta berani menghadapi tantangan-tantangan baru diberbagai sektor.

#### **Kriteria dan Tahapan Pengembangan Program OVOP**

Penetapan kriteria untuk dijadikan komoditas atau produk dalam program OVOP merupakan suatu hal yang sangat penting, dikarenakan jika terjadi suatu kekeliruan maka akan menyebabkan penghalang program OVOP tersebut. Berikut adalah penetapan kriteria komoditas atau produk unggulan OVOP menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2010) :

- a. Merupakan produk unggulan desa/daerah atau kompetensi inti dan telah dikembangkan secara turun-temurun.
- b. Merupakan komoditas/produk khas dan unik dari desa/daerah setempat / lokal.
- c. Memiliki tampilan dan kualitas produk yang baik.
- d. Memiliki peluang pasar yang luas secara domestic maupun internasional.
- e. Memiliki nilai tambah produk yang tinggi,
- f. Dapat menjadi penghela bagi ekonomi lokal atau setempat.

#### **Kelembagaan**

Karseno dan Adjie (2001: 10) mengemukakan bahwa “peranan berbagai lembaga merupakan masalah sentral dalam mengemukakan keberhasilan setiap kebijakan. Dibidang ekonomi makro, koordinasi antar berbagai lembaga seringkali diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif”.

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dalam pendekatan kualitatif. Menurut Patton (2006: 37) evaluasi implementasi adalah penting untuk mengetahui

sejauh mana keefektifan suatu program setelah diterapkan secara penuh. Evaluasi implementasi menginformasikan kepada *decision maker* tentang apa yang terjadi didalam program, bagaimana program dikembangkan, dan mengapa program menyimpang dari rencana semula. Karena itu, metode kualitatif cocok untuk menggambarkan implementasi program.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang pertama karena KSU paguyuban tenun troso sebagai lembaga pelaksana program OVOP di Desa Troso, yang kedua KSU paguyuban troso hanya memiliki satu bidang usaha yaitu simpan pinjam, yang ketiga karena anggota koperasi hanya berjumlah 34 dari 282 pengusaha di Desa Troso. Sumber data penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan lapangan yaitu dengan anggota KSU Paguyuban Tenun troso dan pihak-pihak yang terkait dengan program ini dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, dokumen dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung di Desa Troso dengan menekankan focus dari observasi terlebih dahulu yaitu kondisi kelembagaan KSU paguyuban tenun troso dalam mengimplementasikan program OVOP. Selanjutnya dengan wawancara dengan informan pemangku kepentingan pelaksanaan program OVOP pada KSU Paguyuban Tenun Troso tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, Perda, Laporan-laporan dan media lainnya. Studi dokumentasi juga dilakukan untuk meneliti catatan-catatan yang penting yang berhubungan dengan Implementasi Program OVOP Pada Koperasi Paguyuban Tenun Troso Di Kabupaten Jepara. Metode pemilihan informan berdasarkan objek kajian penelitian sehingga informan terpilih menggunakan orang-orang yang terlibat

langsung atau yang dianggap memahami objek dan kajian penelitian. Informan tersebut adalah pengurus KSU Paguyuban Tenun Troso untuk mengetahui struktur kelembagaan koperasi dalam menjalankan program OVOP, pengawas KSU Paguyuban Tenun Troso diambil 1 dari rekomendasi pengurus, anggota KSU Paguyuban Tenun Troso untuk melihat pola interaksi antar actor koperasi, pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jepara yaitu kepala bidangnya guna mendapat gambaran tentang struktur kelembagaan KSU Paguyuban Tenun Troso, yang terakhir adalah pendapat masyarakat yang bukan anggota KSU Paguyuban Tenun Troso untuk mengetahui tentang OVOP.

### **Tahap-Tahap Penelitian**

Moleong (2004: 127-148) mengemukakan bahwa tahap penelitian secara umum ada tiga tahap yaitu : (1) tahap pra-lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan dan (3) tahap analisis data. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Tahap pra-lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan
- b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan sambil mengumpulkan data,
- c. Tahap analisis data

Menurut Patton (2009:251), ketika pengumpulan data berakhir dan itu adalah waktunya memulai analisis formal, evaluator mempunyai dua sumber utama untuk menggambarkan dari analisis pengorganisasian: (1) pertanyaan evaluasi yang telah dibangkitkan selama tahap konseptual dan rancangan proyek, dan (2) wawasan analitis dan penafsiran yang muncul selama pengumpulan data.

## 1.8 Analisis Data

Menurut Bogdan & Taylor dalam Moleong (2004: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dari rumusan diatas dapat ditarik simpulan bahwa tahap awal analisis data adalah mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Moleong (2004:288-289) mengungkapkan proses analisis data mencakup:

### 1. Reduksi data

- a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar dapat tetap ditelusuri data /

satunya, berasal dari sumber mana. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan kode untuk analisis data dengan komputer cara kodingnya lain, karena disesuaikan dengan keperluan analisis komputer tersebut.

## 2. Kategorisasi

- a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
- b. Setiap kategori diberi nama yang disebut 'label'.

## 3. Sintesisasi

- a. Mensistesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
- b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama atau label lagi.

## 4. Menyusun Hipotesis kerja

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proposional. Hipotesis kerja hendaknya terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian.

## **B. PEMBAHASAN**

Implementasi program OVOP pada KSU Paguyuban Tenun Troso diawali dengan adanya sosialisasi program OVOP dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar. Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara ini biasa disingkat dengan DINKOPUMKMP. Sosialisasi tersebut diberikan kepada pengurus koperasi daerah sentra produk unggulan se- Kabupaten Jepara.

Setelah kegagalan kerajinan ukir relief dalam seleksi program OVOP tingkat nasional, selanjutnya pada tahun 2011 DINKOPUMKMP melakukan pembinaan kepada KSU Paguyuban Tenun Troso. Produk unggulan tenun troso diusulkan dikarenakan dinilai telah memiliki prasyarat yang ditetapkan pada program OVOP nasional. Langkah awal untuk seleksi program OVOP nasional, pengurus KSU Paguyuban Tenun Troso bersama DINKOPUMKMP mengusulkan produk tenun troso

untuk maju OVOP provinsi dahulu. Menurut sekretaris KSU Paguyuban TenunTroso, tidak mudah untuk mendapatkan program OVOP tingkat nasional. Terdapat kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi dan berbagai seleksi yang harus diikuti. Hingga pada akhirnya produk tenun troso Pada Tahun 2013 diresmikan produk OVOP tingkat nasional. Berikut program implementasi pada tahap input yang mengacu pada system OVOP dalam instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 518/23546 tahun 2011 yaitu meliputi penyerapan SDM kompeten, penyediaan bahan baku, dan permodalan. Sedangkan pada proses implementasi program OVOP pada paguyuban tenun troso pada tahap proses yaitu jaringan usaha, teknologi pengolahan, kemasan dan brand product.

Pada hakikatnya, di dalam implementasi itu sendiri terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau regulasi tersebut memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan yang menginterpretasikan regulasi tersebut yang berupa membentuk organisasi, mengerahkan sumber daya, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat masyarakat pengerajin tenun troso untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi adalah: 1) Kontribusi koperasi dirasa tidak besar dalam pengembangan usaha mereka dikarenakan belum bisa memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan usaha; 2) Kurangnya pengetahuan terhadap perkoperasian; 3) Keterbatasan waktu mereka untuk tergabung dalam organisasi yang melibatkan sejumlah anggota, dikarenakan waktu mereka habis untuk digunakan mengelola usahanya masing-masing.

Adanya program OVOP ternyata juga tidak dapat menyelesaikan masalah permodalan. Berhubungan dengan itu, KSU Paguyuban Tenun Troso yang hanya mempunyai satu unit usaha yaitu simpan pinjam belum dapat menarik anggota karena kontribusinya dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu masalah pembiayaan usaha pada koperasi merupakan salah satu hambatan yang mempengaruhi implementasi program OVOP pada KSU Paguyuban Tenun Troso

Dengan demikian, indikator tahap input mendapat penilaian buruk dikarenakan belum semua sesuai dengan sub-indikator dalam Instruksi gubernur Jawa Tengah Nomor 518/23546. Meskipun dalam penyerapan SDM kompeten sudah berjalan dengan baik, namun disisi lain tidak adanya unit penyediaan bahan baku dan usaha simpan pinjam yang belum dapat membantu kebutuhan anggota dalam sisi permodalan, menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk perlu ditingkatkan. Berikut adalah matriks yang menunjukkan penilaian indikator tahap input implementasi program OVOP pada KSU Paguyuban Tenun Troso.

Komitmen merupakan salah satu persyaratan penting yang harus dimiliki oleh anggota koperasi yang diberi tugas untuk mencapai tujuan implementasi program OVOP. Dalam hal ini adalah kelembagaan KSU Paguyuban Tenun Troso. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya

Namun demikian, komitmen tersebut baru akan berkontribusi dalam menghasilkan hasil pekerjaan yang maksimal ketika para personel tersebut memiliki kompetensi atau keahlian untuk menjalankan tugas yang didelegasikan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kelembagaan KSU Paguyuban Tenun Troso memiliki komitmen dan kompetensi yang baik dalam mengembangkan

program OVOP di Desa Troso ini. Dengan demikian KSU Paguyuban Tenun Troso memiliki struktur kelembagaan yang baik. Meskipun tidak ada struktur kepengurusan khusus yang dibentuk dalam implementasi program OVOP ini, namun struktur kepengurusan yang ada sudah berkompeten dalam implementasi program OVOP pada KSU Paguyuban Tenun Troso.

Semua pihak dalam kelembagaan KSU Paguyuban Tenun Troso ini juga berkomitmen dalam pengembangan program OVOP, serta tidak ada dominasi aktor dalam pengambilan keputusan. Jika manfaat atau keunggulan yang diberikan oleh koperasi bagi seseorang lebih tinggi dari manfaat yang dapat diperoleh atau dicapainya olehnya pada saat dia tidak menjadi anggota koperasi, maka orang tersebut akan masuk menjadi anggota koperasi dan melakukan usaha dengan koperasinya, atau dengan kata lain koperasi dapat menarik anggotanya. Sebaliknya, jika manfaat yang dicapai seseorang pada saat dia tidak menjadi anggota koperasi lebih tinggi daripada manfaat atau keunggulan yang diberikan koperasi, maka orang tersebut tidak akan menjadi anggota koperasi. Realitanya dalam KSU Paguyuban Tenun Troso sekarang hanya mempunyai satu unit bidang usaha, yaitu unit simpan pinjam. Namun ternyata unit simpan pinjam tersebut belum dapat mencukupi dalam membantu kekurangan modal para anggota. Hal tersebut pastinya akan mempengaruhi kepuasan anggota terkait manfaat yang dapat diperoleh anggota yang tergabung dalam organisasi koperasi.

Dampak implementasi program OVOP berkenaan dengan penerapan tiga prinsip OVOP yaitu: berpikir global bertindak lokal, kemandirian dan kreativitas, dan pengembangan sumberdaya manusia. Dikaitkan dengan prinsip pertama yaitu berpikir global bertindak lokal memiliki kesesuaian dengan penerapan program OVOP di Desa



Troso. Hal ini berkaitan dengan pengembangan potensi produk tenun troso yang menjadi fokus utama pemerintah dalam program OVOP ini.

Prinsip yang kedua yaitu kemandirian dan kreativitas yang bermakna memanfaatkan potensi yang dimiliki secara kreatif dengan usaha-usaha yang mandiri sudah cukup terlihat dalam pelaksanaan OVOP di Desa Troso. Program OVOP dititik beratkan kepada pengembangan kemandirian atau pemberdayaan masyarakat Desa Troso.

Prinsip ketiga yaitu pengembangan sumberdaya manusia dapat dikembangkan melalui pembinaan dari pemerintah terhadap masyarakat setempat. Dengan pengembangan motivasi dan kreativitas para pelaku usaha tenun troso, diharapkan dapat menjadi serangkaian aktivitas dalam rangka perluasan akses pasar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Troso.

Dengan adanya penerapan ketiga prinsip OVOP tersebut, Hal tersebut sejalan dengan tujuan program OVOP serangkaian aktivitas tersebut berkesinambungan dalam rangka perluasan akses pasar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Troso.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses implementasi program OVOP pada Koperasi Paguyuban Tenun Troso sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari penilaian semua indikator yang masuk dalam kategori baik, kecuali indikator input. Sedangkan untuk indikator proses dan indikator output sudah berjalan dengan baik.

- b. Koperasi Paguyuban Troso memiliki kelembagaan yang baik dalam melaksanakan program OVOP. Hal ini ditunjukkan dari penilaian semua indikator yang masuk dalam kategori baik, kecuali indikator keanggotaan. Untuk indikator struktur kelembagaan berada pada kategori baik, indikator pola interaksi antar aktor dinyatakan baik, serta hubungan antar peran dinyatakan juga baik.
- c. Implementasi program OVOP pada Koperasi Paguyuban Tenun Troso memiliki dampak yang baik terhadap perluasan jaringan pemasaran tenun troso dan peningkatan pendapatan pelaku usaha tenun troso. Hal tersebut ditunjukkan dari penilaian semua indikator yang masuk dalam kategori baik, yaitu indikator perluasan jaringan pemasaran tenun troso dan peningkatan pendapatan pelaku usaha tenun troso.

## **2. Saran**

Setelah meneliti dan mengetahui permasalahan dalam implementasi Program OVOP pada Koperasi Paguyuban Tenun Troso, maka beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi kekurangan modal pada Koperasi Paguyuban Tenun Troso dapat melakukan pinjaman dengan pihak luar. Dengan mencari pembiayaan yang murah biaya modal agar tidak terlalu membebani koperasi.
- b. Meningkatkan kerjasama berbagai sektor usaha dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan konsep Desa Wisata OVOP.
- c. Meningkatkan peran Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara, masyarakat dan sektor usaha guna peningkatan citra produk tenun troso, serta pengelolaan sistem program OVOP.
- d. Mengembangkan manajemen Koperasi Paguyuban Tenun Troso dengan cara peningkatan profesionalisasi pengurus melalui pelatihan-pelatihan, dan membangun informasi yang sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Dinkop. (2013, 25 Maret). Launching Produk Unggulan Melalui OVOP. Portal PPID Prov. Jateng. Tersedia: <http://ppid.jatengprov.go.id/article/details/launching-produk-unggulan-daerah-melalui-ovop-1364181863>, diakses pada tanggal 11 Februari 2017
- Alamsyah, Indrahti, Sri dan Siti Maziyah. 2013. *Kearifan Lokal Pada Industri Tenun Trosro: Potret Kewirausahaan Pada Masyarakat Desa*. Semarang: CV Madina
- Bambang Sunoto, Rudy. 2010. Buku Putih Sanitasi Kota Jepara. Jepara: Bappeda Kabupaten Jepara.  
Data Potensi Industri Kabupaten Jepara 2009-2013
- Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan OVOP (*One Village One Product*)", diunduh tanggal 3 Desember 2016
- Ghony, M Junaidi & Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Hanrahmawan, Fitroh. 2010. "Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Balai Latihan Tenaga Kerja Industri Makasar)". Dalam Jurnal Administrasi Publik Volume 1 No.1 Makassar: Balai Latihan Kerja Industri
- Fatimah dan Darna. 2014. "Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)" Dalam Jurnal, Volume 10 No. 2 Hal 127-138 Depok: Politeknik Negeri Jakarta
- Ingpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ingpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009
- Karseno, Arief Ramlan dan Arti Adjie. 2001. *Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2014. Kesejahteraan Keluarga. Tersedia: <http://prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/mpublik/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2017
- Menteri Negara Koperasi dan UKM RI. 2010. *Blue Print One Village One Product*. Jakarta : Kementerian Koperasi dan UKM
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muta'ali, Luthfi. 2013. *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perspektif Keruangan)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) Universitas Gadjah Mada
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara Surabaya
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (OVOP)

- Pramono, Titik S. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara 2012-2017
- Ropke, Jochen. 2012. *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Afabetha
- Syaeffudin, Fahmi. 2013. *Implementasi Program One Village One Product (OVOP) Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus di kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
- Syarif, Teuku. 2008. "Kajian Efektivitas Modal Promosi Pemasaran UMKM". Jurnal. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK
- Undang – Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Yuliani, Titik. 2012. *Analisis Aspek Kelembagaan Koperasi Dalam Melaksanakan Program One Village One Product (OVOP) Binaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah*. Skripsi. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia